

PERAN *STAKEHOLDERS* DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KECAMATAN SEMARANG BARAT

Noviana Rachma, Kismartini Kismartini, Retna Hanani

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Kota Semarang Kode Pos 50275

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 745405

Laman : www.fisip.udip.ac.id E-mail : fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Kebijakan percepatan penurunan *stunting* sebagai kebijakan pemerintah untuk mencegah dan menurunkan kasus *stunting*. Dalam keberjalanan kebijakan ini, terdapat beberapa masalah yang dihadapi seperti masih tingginya kasus *stunting* di Kecamatan Semarang Barat, kurangnya pengetahuan tentang gizi, adanya kasus ibu hamil anemia dan kekurangan energi kronis (KEK) serta kurangnya partisipasi swasta. Pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Semarang Barat melibatkan berbagai pihak. Dalam mengoptimalkan peran setiap *stakeholders* yang terlibat maka diperlukan adanya pengidentifikasian peran *stakeholders*. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi *stakeholders*, peran *stakeholders* dan faktor pendorong dan penghambat peran *stakeholders*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *stakeholders* dalam pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Semarang Barat terbagi atas tiga kelompok *stakeholders* yakni *stakeholders* pemerintah, masyarakat dan swasta. Berdasarkan perannya dalam pelaksanaan kebijakan di Kecamatan Semarang Barat, *stakeholders* memiliki peranan sebagai *policy creator*, koordinator, implementor, fasilitator, serta akselerator. Peranan yang dilakukan oleh *stakeholders* telah memenuhi klasifikasi peran *stakeholders*, meskipun masih memiliki beberapa kendala dan tantangan. Faktor penghambat peran *stakeholders* berasal dari perspektif aktor dan partisipasi aktor. Sedangkan, faktor pendorong berasal dari aksesibilitas aktor dan penentu tindakan. Saran dalam penelitian ini yaitu puskesmas perlu melakukan sosialisasi secara lebih rutin dan intensif, pemerintah Kota Semarang mendorong keterlibatan swasta dan Dinas Kesehatan Kota Semarang memberikan pelatihan penggunaan alat antropometri kepada kader posyandu secara intensif.

Kata kunci : *stakeholders*, peran *stakeholders*, *stunting*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penanganan permasalahan *stunting* sekarang bukan hanya menjadi target suatu daerah, tetapi sudah menjadi agenda besar dunia dalam rangka mengakhiri kelaparan dan terjadinya malnutrisi. Upaya nyata yang dilakukan melalui penerapan konsep pembangunan berkelanjutan yang disebut dengan *Sustainable Development Goals*. Permasalahan *stunting* tercantum dalam target SDGs ke-2 dalam rangka mengakhiri kelaparan dan mencapai nutrisi yang lebih baik.

Stunting menjadi isu yang penting untuk segera diselesaikan oleh pemerintah karena berpengaruh pada segi kognitif anak. Secara jangka panjang akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa mendatang (Wiguna et al., 2021). Permasalahan *stunting* menjadi tanggung jawab bersama dan melibatkan berbagai *stakeholders* dalam rangka mencapai kerja sama. Dalam hal ini tertuang dalam Perpres No. 72 tahun 2021. Peraturan tersebut kemudian diturunkan menjadi Perwal No. 27 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Semarang.

Pada tahun 2021 Kota Semarang ditetapkan sebagai lokus *stunting* sehingga

masalah *stunting* menjadi program prioritas Kota Semarang. Berdasarkan data Dinas Kesehatan per September 2022 *stunting* di Kota Semarang mencapai 1.448 anak.

Pemerintah Kota Semarang telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi *stunting*, tetapi masih ditemukan kasus *stunting* di Kota Semarang. Bahkan di beberapa kecamatan kasus *stunting* mengalami kenaikan pada beberapa bulan terakhir.

Tabel 1. 1 Jumlah Kasus *Stunting* Per Kecamatan di Kota Semarang pada Oktober 2022

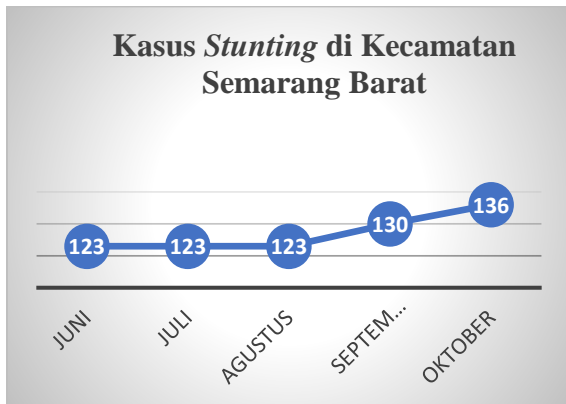
No	Kecamatan	Jumlah Kasus <i>Stunting</i>
1	Semarang Utara	205
2	Semarang Barat	136
3	Ngaliyan	125
4	Semarang Timur	119
5	Gunungpati	110

Sumber : Data diolah peneliti dari Dashboard Dinas Kesehatan, 2022

Berdasarkan data Dinas Kesehatan, Kecamatan Semarang Barat menjadi salah satu kecamatan dengan kasus *stunting* yang tinggi di Kota Semarang. Pada September 2022 Kecamatan Semarang Barat menempati posisi kedua setelah Semarang Utara sebagai penyumbang kasus *stunting* tertinggi di Kota

Semarang. Dari beberapa bulan terakhir grafik kasus *stunting* di Kecamatan Semarang Barat mengalami kenaikan sehingga target menurunkan *stunting* dalam beberapa bulan belum tercapai.

Gambar 1. 1 Kasus *Stunting* di Kecamatan Semarang Barat (Juni – Oktober 2022)



Sumber : Dashboard Dinas Kesehatan, Oktober 2022

Meskipun Kecamatan Semarang Barat berada pada urutan kedua sebagai penyumbang kasus *stunting* terbanyak di Kota Semarang, tetapi masalah *stunting* lebih kompleks dibandingkan dengan di Kecamatan Semarang Utara. Penyebab *stunting* di Semarang Utara sebagian besar dikarenakan kemiskinan dimana mereka tidak dapat memenuhi asupan makanan bergizi untuk anak mereka.

Berbeda dengan Semarang Barat dimana anak *stunting* berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah. Di kecamatan

tersebut juga terdapat berbagai pabrik industri dan warganya banyak yang bekerja di tempat tersebut. Hal tersebut menyebabkan anak-anak mereka tidak diasuh dengan cara benar sehingga berpotensi mengalami *stunting*.

Masalah *stunting* merupakan masalah yang kompleks sehingga memerlukan keterlibatan dan peran dari beberapa *stakeholder* agar dapat menekan penurunan *stunting* di Kecamatan Semarang Barat. Menurut (Maryono, 2005 dalam Yosevita & Latupapua) *stakeholders* merupakan individu atau kelompok yang terkena maupun memberikan dampak pada sebuah kebijakan. *Stakeholders* berdasarkan perspektif *governance* terbagi menjadi *stakeholder* pemerintah, swasta dan masyarakat. Setiap *stakeholder* tersebut memiliki memiliki perannya masing-masing dalam pelaksanaan kebijakan.

Dinas Kesehatan Kota Semarang berperan dalam membuat dan mengambil keputusan kebijakan penanggulangan *stunting* di Kota Semarang. Namun, dilihat dari pelaksanaannya peran tersebut masih belum optimal. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya kasus *stunting* di Kota Semarang yakni mencapai 1.448 kasus *stunting* (Dinas Kesehatan, 2022). Dilihat dari grafik kasus

stunting di Kecamatan Semarang Barat juga mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir.

Pengetahuan keluarga tentang gizi sangat penting karena salah satu penyebab *stunting* adalah kurangnya asupan gizi. Pada penelitian (Ningtyas et al., 2020) menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan ibu tentang gizi terhadap *stunting* pada balita di wilayah kerja Puskesmas Karangayu Kecamatan Semarang Barat. Pengetahuan terkait gizi ini nantinya juga akan berdampak pada pola asuh ibu kepada anaknya.

Ibu hamil yang menjadi salah satu sasaran pada kebijakan percepatan penurunan *stunting* juga rawan mengalami anemia. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Semarang tahun 2021 Puskesmas Krobokan yang merupakan salah satu puskesmas di wilayah Kecamatan Semarang Barat yang menyumbang angka hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan anemia tertinggi di Kota Semarang. Persentase ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) di Puskesmas Krobokan sebesar 9,89% dan persentase ibu hamil anemia mencapai 45,23% (Mei et al., 2023). Kesehatan ibu pada saat hamil akan berpengaruh pada perkembangan janin dalam kandungan dan

saat bayi lahir. Karena penyebab *stunting* dimulai dari masa kandungan. Jika pada saat hamil ibu kurang mengonsumsi makanan bergizi dan mengalami anemia maka dapat memicu bayi yang dilahirkan *stunting*.

Kurangnya keterlibatan swasta dalam menangani masalah *stunting* di Kecamatan Semarang didasarkan pada data dari *website csr.semarangkota.go.id* bahwa untuk di bidang kesehatan khususnya pada penanganan *stunting* hanya ada PT Phapros yang secara berkala memberikan bantuan. Padahal keterlibatan swasta penting dalam pencapaian tujuan kebijakan. Sebagaimana dalam penelitian (Prahastuti, 2020) yang menyatakan bahwa untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan mengatasi *stunting* diperlukan peranan aktif *private sector*.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

- a. Siapa saja *stakeholders* yang terlibat dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Semarang Barat?
- b. Bagaimana peran *stakeholders* yang terlibat dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Semarang Barat?

- c. Apa saja faktor pendorong dan faktor penghambat keberhasilan peran *stakeholders* dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Semarang Barat?

Kerangka Teori

Kebijakan Publik

Menurut Riant Nugroho (2017) Kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat oleh negara khususnya pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Sedangkan, menurut (Anderson dalam Agustino, 2020) kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan dengan maksud atau tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok aktor yang terkait.

Implementasi Kebijakan

Menurut van Meter dan van Horn (dalam Winarno, 2014 : 149), proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu/ pejabat/ kelompok pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan pada kebijakan. Sedangkan, menurut (Mazmanian dan Sebatier dalam Agustino, 2020 : 146) implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan dengan

mengidentifikasi masalah, tujuan yang ingin dicapai dan cara mengatur implementasi.

Stakeholders

Menurut Kadiwaraka (dalam Kismartini et al., 2019) *stakeholders* adalah semua pihak baik secara individu, maupun kelompok yang dapat dipengaruhi dan/atau mempengaruhi pengambilan keputusan serta pencapaian tujuan suatu kegiatan.

Crosby (dalam Kismartini & Yusuf, 2015) membagi *stakeholders* menjadi tiga klasifikasi yaitu *stakeholders* utama, *stakeholders* pendukung, dan *stakeholders* kunci. Klasifikasi *stakeholders* juga dapat dilihat berdasarkan perspektif *governance*. *Stakeholders* dibagi menjadi tiga jenis yaitu negara atau pemerintah (*state*), masyarakat sipil (*civil society*), dan masyarakat ekonomi (*private sector*).

Peran Stakeholders

Setiap *stakeholders* memiliki peran yang berbeda-beda pada keterlibatannya dalam sebuah kebijakan. Menurut Nugroho (2014), peran *stakeholders* dapat diklasifikasikan menjadi berikut:

- a. *Policy Creator* yaitu *stakeholder* yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan.

- b. Koordinator yaitu *stakeholder* yang berperan dalam mengkoordinasikan *stakeholder* lain yang terlibat.
- c. Fasilitator yaitu *stakeholders* yang berperan sebagai fasilitator yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran.
- d. Implementor yaitu *stakeholder* pelaksana kebijakan yang didalamnya termasuk kelompok sasaran.
- e. Akselerator yaitu *stakeholders* yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Situs penelitian ini adalah di Kecamatan Semarang Barat dan Dinas Kesehatan Kota Semarang. Subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu Dinas Kesehatan, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Semarang Barat, kelurahan, FKK, PKK serta puskesmas. Penelitian ini juga menggunakan teknik *snowball sampling* dimana informan selanjutnya adalah Bappeda Kota Semarang, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, pengasuh Rumah Pelita serta Posyandu Mekarsari. Jenis data yang digunakan yaitu

data kualitatif, menggunakan sumber data primer berupa hasil wawancara dengan informan dan observasi di lapangan serta data sekunder berupa penelitian terdahulu maupun dokumen resmi yang berkaitan dengan *stunting*. Kualitas data pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identifikasi *Stakeholder*

Stakeholders pada implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Semarang Barat terdiri dari dua belas *stakeholders*, yaitu Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, kecamatan, kelurahan, puskesmas, posyandu, FKK, PKK, pengasuh rumah pelita masyarakat, serta pihak swasta. Dua belas *stakeholders* tersebut akan dikelompokkan menjadi tiga berdasarkan perspektif *governance*.

Stakeholder pemerintah (state)

Pada implementasi sebuah kebijakan, *stakeholders* negara seringkali memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan *stakeholders* lain. *Stakeholders* negara terdiri dari organisasi atau lembaga pemerintahan yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Pengendalian Penduduk

dan KB, kecamatan, serta kelurahan. Adapula *stakeholder* di luar organisasi perangkat daerah yaitu puskesmas yang berada di bawah naungan Dinas Kesehatan.

Stakeholder masyarakat (civil society)

Pada kajian terkait *stakeholders*, masyarakat yang dimaksud tidak hanya masyarakat secara umum sebagai individu, tetapi dapat juga berupa kelompok atau komunitas. Dalam *civil society organizations* (CSOs) memiliki berbagai bentuk seperti LSM, paguyuban, perkumpulan agama, dll. *Stakeholder* masyarakat berasal dari luar pemerintah yang turut membantu pelaksanaan kebijakan. *Stakeholder* masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Semarang Barat terdiri atas FKK, PKK, posyandu, pengasuh rumah pelita, serta masyarakat.

Stakeholder swasta

Pihak swasta memiliki peran penting dalam membantu pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan. Swasta dalam suatu kebijakan berfungsi untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan pendanaan dalam sebuah kegiatan. Pihak swasta yang ikut serta serta membantu pencegahan *stunting* di

Kecamatan Semarang Barat adalah PT Phapros yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang farmasi.

B. Peran *Stakeholder*

Peranan yang dilakukan oleh *stakeholder* dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Semarang Barat terdiri atas peran lima peran, yakni *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementor, serta akselerator.

Policy Creator

Stakeholder yang dikategorikan memiliki peranan *policy creator* adalah *stakeholder* yang mempunyai kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan maupun penetapan suatu kebijakan. Pada implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Semarang Barat *stakeholder* yang berperan sebagai *policy creator* yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Bappeda.

Peran Dinas Kesehatan sebagai *policy creator* yaitu dengan ikut serta membuat program yang mendukung percepatan penurunan *stunting* seperti pada intervensi spesifik dan turut serta

pembuatan kebijakan percepatan penurunan *stunting*. Beberapa program intervensi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan seperti pelayanan PUS dan WUS, pemeriksaan kehamilan, pelayanan persalinan, pelayanan bagi bayi, serta pelayanan bagi balita hingga usia remaja.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berperan sebagai *policy creator* karena memiliki wewenang dalam membuat program yang mendukung percepatan penurunan *stunting*. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menginisiasi program Dashat (Dapur Sehat Atasi *Stunting*) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Sedangkan, peran Bappeda sebagai *policy creator* yaitu terlibat dalam penyusunan Perwal No. 27 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dan SK Penetapan Kelurahan Lokasi Fokus Intervensi Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Semarang.

Koordinator

Menurut (Nugroho et al., 2014) koordinator merupakan *stakeholder* yang berperan dalam mengkoordinir *stakeholder* lain dalam rangka mencapai

tujuan. *Stakeholder* yang berperan sebagai koordinator pada implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Semarang Barat yaitu Dinas Kesehatan, Bappeda, dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dalam bekerja mengatasi masalah *stunting*, Dinas Kesehatan berperan untuk mengkoordinir puskesmas. Mengingat bahwa puskesmas ini berada di bawah naungan Dinas Kesehatan dan puskesmas akan terjun ke lapangan untuk mengambil data baduta *stunting*. Di Kecamatan Semarang Barat terdapat 5 puskesmas sehingga Dinas Kesehatan akan mengkoordinir puskesmas tersebut untuk melaporkan data kasus *stunting* per bulannya. Dinas Kesehatan juga mengkoordinir puskesmas dan kelurahan dalam penyaluran bantuan PMT yang ditujukan kepada balita *stunting* dan PMT untuk balita di posyandu.

Peran Bappeda dalam masalah *stunting* lebih kepada mengkoordinasi OPD untuk turut serta mengintervensi masalah *stunting*. Dalam upaya penurunan *stunting* melibatkan berbagai OPD agar tetap mengintervensi masalah *stunting* sesuai dengan bidangnya.

Bappeda juga mengkoordinir dan mengumpulkan OPD untuk mengetahui program dan anggaran yang dimiliki.

Implementor

Implementor merupakan *stakeholder* yang berperan sebagai pelaksanaan kebijakan yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran dari kebijakan. Pada implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Semarang Barat, *stakeholder* yang berperan sebagai implementor yaitu Dinas Kesehatan, Disdalduk KB, kecamatan, kelurahan, pengasuh rumah pelita serta masyarakat.

Dinas Kesehatan memiliki beberapa program yang mendukung penurunan *stunting*. Dinas Kesehatan melaksanakan intervensi dari segi bidang kesehatan. Intervensi spesifik yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam menangani masalah *stunting* dimulai dari masa remaja hingga balita. Pada remaja akan diberikan tablet tambah darah dan edukasi kesehatan reproduksi. Dinas Kesehatan memberikan layanan kepada ibu hamil dan nifas. Untuk ibu hamil KEK dan mengalami anemia sehingga tergolong berisiko tinggi nantinya akan diberikan bantuan dan dipantau oleh

puskesmas sebagai perpanjangan tangan Dinas Kesehatan di wilayah kerjanya. Ibu hamil KEK dan anemia akan diintervensi melalui pemberian PMT selama 90 hari. Sedangkan, balita dengan gizi kurang dan juga akan *stunting* akan mendapatkan layanan kesehatan dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT).

Pada pelaksanaan kebijakan, masyarakat atau kelompok sasaran harus memperoleh informasi yang optimal yang dapat disampaikan melalui kegiatan sosialisasi. Dinas Kesehatan menggunakan media sosial sebagai sarana untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Akan tetapi, peran Dinas Kesehatan sebagai implementor masih belum optimal. Dinas Kesehatan sudah berupaya mengintervensi pada ibu hamil berisiko tinggi dan bayi di bawah dua tahun (baduta) *stunting* dalam kurun waktu tertentu. Saat ini, masih ada kasus ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan anemia yang dapat berpotensi melahirkan anak *stunting* dan masih adanya balita *stunting* di Kecamatan Semarang Barat.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB)

berperan sebagai implementor pada implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Semarang Barat dengan menjalankan program yang sifatnya preventif seperti program Generasi Berencana.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak hanya mengintervensi remaja, tetapi juga melalui berbagai kegiatan keluarga berencana. Intervensi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini sebenarnya lebih kepada tindakan preventif agar tidak terjadi kasus *stunting*. Disdalduk KB akan memberikan edukasi kepada calon pengantin agar turut mencegah *stunting* dan lebih matang dalam mempersiapkan masa depan dan memperhatikan kesejahteraan anak kelak.

Kecamatan berperan sebagai implementor dengan ikut terlibat pada pemberian sosialisasi kepada masyarakat di Kecamatan Semarang Barat. Pada setiap kesempatan yang melibatkan warga maka pihak kecamatan akan turut memberikan motivasi dan edukasi terutama kepada orang tua baduta *stunting*.

Target percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Semarang Barat memang tidak ditarget secara pasti untuk jumlah anak yang lolos *stunting* setiap bulannya, tetapi dilihat bahwa ada penurunan dalam waktu 3 bulan masa intervensi. Namun, kenyataan di lapangan dengan melihat grafik kasus *stunting* di Kecamatan Semarang Barat mengalami kenaikan.

Kelurahan berperan sebagai implementor pada implementasi kebijakan turut memberikan sosialisasi kepada masyarakat di wilayahnya. Pihak kelurahan juga akan mengundang pihak luar seperti ahli gizi maupun orang yang ahli di bidang kesehatan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat umum maupun kepada orang tua yang memiliki anak *stunting*.

Pengasuh rumah pelita berperan sebagai implementor yang bertugas untuk membantu menerapkan pengasuhan yang baik kepada anak *stunting*. Karena penyebab utama *stunting* di Kecamatan Semarang Barat adalah pola asuh orang tuanya. Para pengasuh ini bertanggung jawab penuh pada makanan anak dengan memastikan mereka makan sesuai dengan waktu

yang ditetapkan. Karena dengan memberikan asupan makanan yang teratur dengan porsi kalori yang sesuai dengan kebutuhan akan mempercepat perkembangan agar sesuai dengan berat normalnya.

Masyarakat berperan sebagai implementor pada pelaksanaan kebijakan penurunan *stunting* di Kecamatan Semarang Barat. Masyarakat menjadi sasaran dari kebijakan percepatan penurunan *stunting* sehingga partisipasi dan penerimaan dari masyarakat terhadap kebijakan ini akan berdampak pada keberjalanan kebijakan ini. Hal tersebut yang menyebabkan masyarakat perlu untuk diintervensi oleh berbagai pihak.

Fasilitator

Fasilitator merupakan *stakeholder* yang memberikan fasilitas yang menunjang pelaksanaan kebijakan. Pada implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Semarang Barat pihak yang berperan sebagai fasilitator yaitu Dinas Kesehatan, Bappeda, puskesmas, kecamatan, kelurahan, FKK, PKK serta posyandu.

Dinas Kesehatan berperan sebagai fasilitator dengan memberikan alat antropometri kepada posyandu. Karena ada beberapa posyandu yang alatnya kurang lengkap dan akan berdampak pada pendeteksian *stunting*. Agar *stunting* dapat cepat terdeteksi maka Dinas Kesehatan memberikan alat untuk mengukur berat badan, tinggi badan, lingkaran lengan dan lingkaran kepala ke posyandu.

Akan tetapi, terdapat keluhan pada bantuan alat antropometri yang diberikan oleh Dinas Kesehatan kepada posyandu. Pengukuran berat dan tinggi badan menjadi hal yang penting sebagai deteksi awal *stunting* sehingga diperlukan alat yang sesuai dengan standar pengukuran. Karena kegiatan posyandu dilaksanakan rutin setiap bulannya sehingga kader berharap alat tersebut dapat digunakan dalam waktu yang lama.

Bappeda berperan sebagai fasilitator dengan memfasilitasi para OPD untuk saling bekerja sama dalam mengatasi masalah *stunting*. Karena dalam mengatasi *stunting* memerlukan kerja sama dari lintas sektor agar dapat mencegah terjadinya *stunting* dan menekan kasus *stunting*. Dengan adanya

fasilitas yang diberikan oleh Bappeda ini nantinya OPD dapat saling berkolaborasi dalam menjalankan program yang dapat menurunkan angka *stunting*.

Pihak kecamatan berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan tempat musyawarah untuk membahas masalah *stunting*. Karena pertemuan rutin bersama lurah di wilayah kecamatan Semarang Barat biasanya dilakukan setelah apel pada hari Senin. Pihak kecamatan juga mengkoordinasi pihak-pihak lain untuk turut serta dalam musyawarah tersebut.

Puskesmas berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan fasilitas kesehatan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, preventif maupun rehabilitatif. Puskesmas memiliki peran yang cukup kompleks dengan melakukan sosialisasi kepada remaja, calon pengantin, ibu hamil hingga ibu yang memiliki anak *stunting*.

Para konsultan gizi ini mengedukasi remaja untuk turut serta dalam kegiatan “minum tablet tambah darah bersama” dengan tujuan untuk mencegah anemia pada remaja. Calon pengantin juga diberikan sosialisasi melalui kelas calon pengantin.

Memberikan edukasi kepada ibu hamil sangat penting karena kesehatan dan asupan gizi yang dikonsumsi ibu hamil akan berdampak kepada tumbuh kembang janin di kandungannya. Konsultan gizi ini akan melakukan pemantauan kepada ibu hamil agar terhindar dari anemia dan kekurangan gizi.

FKK berperan sebagai fasilitator sebagai wadah diskusi dengan masyarakat sebagai tindakan preventif dengan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait *stunting*. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat sadar akan pentingnya mencegah *stunting* dan turut terlibat dalam pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan *stunting* mulai dari lingkungannya.

Peran FKK sebagai unit yang dekat dengan masyarakat untuk menyalurkan informasi lebih lanjut kepada masyarakat sangat penting karena masih ada *mindset* dari masyarakat setempat yang salah dalam mengartikan *stunting*. Masih adanya anggapan bahwa gizi buruk dan *stunting* adalah masalah kesehatan yang sama. Para kader FKK ini nantinya berperan dalam menyalurkan bantuan PMT tersebut kepada baduta *stunting*.

Kader PKK yang dekat dengan masyarakat dan terlibat dalam pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*. Kader memiliki peran sebagai fasilitator dengan memberikan pendampingan dan menyalurkan informasi terkait *stunting* kepada masyarakat sebagai upaya preventif dalam mencegah *stunting* dan memberikan motivasi kepada keluarga.

Posyandu menjadi pusat pelayanan yang diberikan oleh masyarakat dengan dilakukan penimbangan balita secara rutin setiap bulannya. Hal tersebut penting dalam melihat pertumbuhan anak, tetapi kualitas pemberian gizi kepada balita juga penting ditekankan kepada ibu balita agar dapat mencegah kejadian *stunting* dan malnutrisi (Shaluhayah et al., 2020).

Posyandu tidak hanya berperan dalam memberikan pelayanan kepada balita, tetapi juga kepada ibu hamil. Kader posyandu memberikan pendampingan kepada ibu hamil terutama kepada ibu hamil yang berisiko tinggi.

Akselerator

Akselerator merupakan *stakeholder* yang membantu

mempercepat keberhasilan kebijakan (Nugroho et al., 2014). Akselerator dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Semarang Barat berasal dari *stakeholder* swasta yaitu PT Phapros. Dengan adanya dana CSR yang dimiliki oleh PT Phapros memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana di Posyandu Mekarsari dan Pelita Sehat untuk mendorong pelaksanaan kegiatan operasi timbang di posyandu tersebut. Tidak hanya itu, PT Phapros juga memberikan sosialisasi untuk pencegahan *stunting* di Kelurahan Bongsari dan Puskesmas Ngemplak Simongan.

C. Faktor Pendorong dan Penghambat Peran Stakeholder

Husnul Yakin dalam Widodo A. A., dkk., 2022) menjelaskan ada 4 unsur yang perlu diperhatikan dalam mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat peran dalam proses implementasi yakni partisipasi aktor, aksesibilitas, serta penentu tindakan.

Faktor pendorong peran *stakeholders* Aksesibilitas Aktor

Aksesibilitas aktor berkaitan dengan bagaimana akses *stakeholder* dalam mewujudkan kebijakan. Dalam

sebuah proses kebijakan, seluruh kelompok baik formal atau informal memiliki akses pada kebijakan tersebut. Dari segi *stakeholder* pemerintah aksesibilitas terhadap kebijakan sangat besar. Dinas Kesehatan memiliki aksesibilitas yang luas pada lingkup masalah *stunting*. Dinas Kesehatan memiliki akses yang luas untuk menerima informasi masalah *stunting* pada setiap puskesmas di wilayah tersebut. Bappeda memiliki akses yang luas pada pelaksanaan kebijakan *stunting* yang meliputi penyampaian informasi, menerima informasi dari *stakeholders* yang terlibat, dan memberikan instruksi kepada para OPD.

Aksesibilitas informasi juga mudah diperoleh masyarakat karena Bappeda telah membuat *website* terkait *stunting* yang berisikan seputar program intervensi spesifik dan program intervensi sensitif yang telah dilakukan oleh pemerintah. Pihak luar juga dapat mengakses perkembangan kasus *stunting* pada *website* ini karena sudah terintegrasi dengan Dashboard Dinas Kesehatan.

Penentu Tindakan

Penentu tindakan berkaitan dengan bagaimana peran *stakeholder* dalam menentukan tindakan untuk mempercepat penurunan *stunting* di Kecamatan Semarang Barat. Dalam kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Semarang Barat sudah ada kelurahan yang menjadi target intervensi. Bappeda juga menyusun *timeline* pelaksanaan 8 aksi pada Aksi Konvergensi *Stunting* yang melibatkan berbagai pihak.

Akan tetapi, Bappeda juga cukup sering mengundang para OPD untuk memaparkan rencana kerjanya dan sejauh ini sudah cukup jelas. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membuat program kerja yang sifatnya untuk mencegah terjadinya *stunting*. Sudah adanya anggaran yang jelas untuk mengintervensi masalah *stunting* yakni yang berasal dari APBD dan BOKP.

Dalam menjalankan kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Semarang Barat para OPD membantu dalam hal pemberian alat antropometri agar posyandu memiliki fasilitas penimbangan. Saat alat tersebut rusak, maka dari pihak puskesmas akan

memfasilitasi dengan meminjamkan alat antropometri mereka kepada kader posyandu agar kegiatan operasi timbang tetap berjalan. Para kader juga memperoleh pelatihan dari pihak puskesmas terkait cara menggunakan alat antropometri yang benar

Faktor Penghambat Peran Stakeholders

Perspektif Aktor

Perspektif merupakan cara pandang dan penerimaan *stakeholder* terhadap kebijakan. Saat persepsi telah terbangun maka akan berdampak pada partisipasi secara sosial dan persepsi dari *stakeholder* dapat membuat masyarakat menjadi pengikut setiap sebuah organisasi (Siregar & Rahmansyah, 2020).

Pemkot Semarang menargetkan untuk tahun berikutnya dapat mencapai *zero stunting* sehingga setiap kecamatan dan kelurahan juga harus *zero stunting*. Namun, dari *stakeholder* pemerintah masih ada yang menganggap bahwa untuk mencapai *zero stunting* cukup sulit. Cara pandang *stakeholder* pemerintah terhadap masalah *stunting* penting karena *stakeholder* pemerintah ini yang akan menggerakkan organisasi atau lembaga yang ada di bawahnya

untuk turut serta berpartisipasi dan berkomitmen pada kebijakan *stunting*

Dari segi *stakeholder* masyarakat masih ada berbagai perspektif yang kurang baik terhadap istilah *stunting*. Pemahaman *stakeholder* terhadap *stunting* dapat diartikan kesiapan *stakeholder* dalam pelaksanaan kebijakan sehingga cara pandang masyarakat sebagai sasaran kebijakan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan berbagai pihak kepadanya menjadi hal yang penting. Masih ada masyarakat yang merasa kesal dan tidak terima saat anaknya didiagnosis *stunting* sehingga masyarakat masih ada yang sensitif ketika mendengar kata “*stunting*”.

Partisipasi Aktor

Partisipasi aktor berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh *stakeholder* dalam mencapai tujuan kebijakan. Keterlibatan seorang aktor dalam suatu kebijakan baik dalam hal memberikan pemikiran maupun tenaganya dalam pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan *stunting* agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Stakeholder pemerintah seperti Bappeda berpartisipasi sebagai pihak yang mengawal Aksi Konvergensi

Stunting dan dalam pelaksanaan aksi-aksi tersebut mengawal OPD untuk saling bekerjasama dalam menurunkan *stunting*. Dinas Kesehatan turut berpartisipasi dalam memberikan bantuan berupa PMT dan alat antropometri ke posyandu di Kecamatan Semarang Barat. Adapula partisipasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memberikan bantuan kepada anak *stunting*. Ketiga *stakeholder* tersebut sudah cukup baik dari segi partisipasi.

Dari segi partisipasi masyarakat yang menjadi sasaran pada kebijakan masih kurang. Padahal mereka sangat penting untuk ikut terlibat pada setiap kegiatan yang telah dirancang oleh OPD terkait dalam menunjang penurunan *stunting* dan mencegah *stunting* sejak dini. Namun, di lapangan partisipasi masyarakat pada kegiatan kelas ibu hamil, sosialisasi dan posyandu masih belum maksimal.

Padahal peran masyarakat pada suatu kebijakan tidak hanya sebatas partisipasi fisik saja, tetapi keterlibatan yang memungkinkan mereka melaksanakan penilaian terhadap masalah dan potensi untuk menentukan

kegiatan yang mereka butuhkan (Siregar & Rahmansyah, 2020).

Partisipasi dari segi swasta juga masih kurang karena tidak semua kelurahan di Kecamatan Semarang Barat memiliki CSR dari pihak swasta. Padahal dalam pelaksanaan kebijakan penurunan *stunting* dapat berjalan dengan semakin baik jika mendapat dukungan dari pihak swasta karena masyarakat tidak bisa hanya bergantung pada bantuan yang diberikan pemerintah. Karena pemerintah juga memiliki keterbatasan sumber daya finansial.

KESIMPULAN

Pada implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Semarang Barat melibatkan dua belas *stakeholders*. Dilihat berdasarkan perspektif *governance, stakeholder* negara terdiri atas Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB), kecamatan, kelurahan serta puskesmas. *Stakeholders* masyarakat (*civil society*) terdiri atas FKK, PKK, pengasuh rumah pelita, posyandu serta masyarakat. Adapun *stakeholders* swasta yaitu PT Phapros.

Selanjutnya berdasarkan perannya, *stakeholders* melakukan lima klasifikasi peran yang meliputi *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementor, serta akselerator. *Stakeholder* dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Semarang Barat telah memenuhi klasifikasi peran *stakeholder*, meskipun masih terdapat beberapa kendala di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menghambat peran *stakeholder* dalam pelaksanaan kebijakan di Kecamatan Semarang Barat terdiri atas faktor perspektif aktor dan partisipasi aktor. Dari segi perspektif aktor masih ada masyarakat yang kurang paham apa itu *stunting* dan adanya pandangan bahwa untuk menuju *zero stunting* menjadi hal yang susah untuk dicapai. Dari segi partisipasi aktor masih ada masyarakat yang enggan untuk mengikuti kelas ibu hamil, sosialisasi bahkan menolak bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Partisipasi swasta juga masih terbatas padahal bantuan finansial dari pihak swasta sangat diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Puskesmas perlu melakukan sosialisasi secara lebih rutin dan intensif pada kegiatan posyandu maupun kegiatan rutin RW tentang pentingnya pengetahuan gizi.
- b. Pemerintah Kota Semarang mendorong keterlibatan swasta untuk mempercepat penurunan *stunting* di Kecamatan Semarang Barat.
- c. Dinas Kesehatan Kota Semarang mempercepat pengadaan alat antropometri untuk kegiatan operasi timbang di posyandu.
- d. Dinas Kesehatan Kota Semarang memberikan pelatihan penggunaan alat antropometri secara intensif kepada kader posyandu agar hasil operasi timbang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2020). *Dasar- Dasar Kebijakan Publik*, (Edisi Revisi Ke- 2). Bandung : Alfabeta.
- Kismartini, K., Kustarto, I., & Priyadi, B. P. (2019). *Analisis Stakeholders dalam Perspektif Governance: Upaya Pencegahan Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Jawa Tengah*. 21–28. <https://doi.org/10.33510/slki.2019.21->

- Kismartini, & Yusuf, M. (2015). Stakeholders Analysis: Managing Coastal Policy Implementation in Rembang District. *Procedia Environmental Sciences*, 23(Ictcred 2014), 338–345. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2015.01.049>
- Mei, H. W. L., Prabamurti, P. N., & Kusumawati, A. (2023). Perilaku Ibu Hamil Kek Dan Anemia Dalam Kegiatan San Piisan (Sayangi Dampingi Ibu Dan Anak Kota Semarang). *Link*, 19(1), 25–33. <https://doi.org/10.31983/link.v19i1.9426>
- Ningtyas, Y. P., Udiyono, A., & Kusariana, N. (2020). Knowledge of Mothers Related to Stunting in Toddlers in the Work Area of the Karang Health Center, Semarang City. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(1), 107–113. <http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm>
- Nugroho, H. C., Zauhar, S., & Suryadi. (2014). Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Pembangunan Dan Alam Lestari*, 5(1), 12–22. <https://jpal.ub.ac.id/index.php/jpal/article/view/147>
- Nugroho, Riant. (2017). Public Policy. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Prahastuti, B. S. (2020). Kajian Kebijakan: Kemitraan Publik Swasta Penanggulangan Stunting di Indonesia Dalam Kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 12(1), 52–61. <https://doi.org/10.37012/jik.v12i1.124>
- Siregar, C. N., & Rahmansyah, S. (2020). Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Implementasi Program Jabar Digital Dalam Akun Instagram Ridwan Kamil Sebuah Kajian Sosio-Digital. *Jurnal Sositologi*, 18(3), 369–380. <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2019.18.3.5>
- Widodo, A. A., Purnaweni, H., & Kismartini, K. (2022). Analisis Peran (Balai Besar Wilayah Sungai) BBWS Pemali Juana dalam Pengelolaan Gulma Air. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(1), 44-52.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta : CAPS.
- Yosevita, T., & Latupapua. (1907). Issn : 1907-7556 implementasi peran. *Agroforestri*.